

Prabowo Bertemu Effendi Simbolon: "Sekarang Berani Kau Sama Aku Ya"

JAKARTA (IM) - Di tengah ramainya perseteruan Anggota DPR Effendi Simbolon dengan TNI buntut pernyataannya yang menyebut TNI gerombolan, kembali viral di media sosial yang memperlihatkan pertemuan politikus PDI-P dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dalam video yang dibagikan akun Tiktok SUC_Militer, terlihat Prabowo tengah rapat dengan DPR RI. Ruangnya juga terlihat di ruang Komisi DPR RI.

Pada momen itu, anggota DPR menyalami Prabowo secara bergantian, dan ketika

giliran Effendi Simbolon, Prabowo menegur sembari berkelakar.

"Bikin pusing aku aja, sekarang berani kau sama aku ya," kata Prabowo sambil tertawa dan tos dengan Effendi Simbolon.

Pernyataan Prabowo pun disambut tawa oleh Effendi Simbolon yang seraya meninggalkannya.

Effendi Simbolon diketahui dengan terlibat perseteruan dengan TNI buntut pernyataannya menyebut TNI seperti gerombolan.

Effendi Simbolon pun telah meminta maaf atas pernyataannya itu. ● me

PPATK Serahkan Temuan Aliran Uang Lukas Enembe ke KPK

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) enggan membeberkan hasil temuan aliran transaksi keuangan janggal di rekening Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).

Namun PPATK memastikan, hasil temuan dan analisis rekening Lukas Enembe telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hasil analisis yang dilakukan PPATK sudah disampaikan ke KPK. Kemana saja dan berapa jumlahnya saya tidak bisa sebutkan," kata Ketua Humas PPATK, M Natsir Kongah saat dikonfirmasi, Jumat (16/9).

Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan cukup intensif berkoordinasi dengan KPK. Ivan memastikan bahwa setiap transaksi yang ada di rekening Lukas Enembe bakal didalami. Termasuk, dugaan adanya aliran uang ke rumah judi online alias kasino di luar negeri.

"Ya kami koordinasi sangat intens dengan KPK. Seluruh transaksi para pihak kami dalam," ujar Ivan dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku telah mengantongi informasi adanya dugaan uang Lukas Enembe yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. KPK bakal mendalami informasi tersebut saat proses pemeriksaan saksi.

"Kemudian, apakah juga menyangkut dengan TPPU judi, ya tentu nanti akan lebih didalami di dalam proses penyidikan," kata Alexander Marwata, Rabu, 14 September 2022.

"Sejauh mana, apakah rekening-rekening yang bersangkutan itu, aliran-aliran dana dari yang bersangkutan itu, apakah ada aliran dana yang sampai ke rumah judi misalnya, ya itu tentu informasi-informasi tersebut yang nanti tentu didalami dalam proses penyidikan," ujarnya. ● han



FOTO: ANT

SIDANG DAKWAAN KASUS PEN

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (kanan) bersama dengan terdakwa kasus dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) L M Rusdianto Emba (kiri) menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (16/9). Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Muna, Sukarman Loke dan pengusaha dari Kabupaten Muna, L M Rusdianto Emba terlibat dalam kasus dugaan suap persetujuan dana PEN untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

MenPAN Minta Semua Daerah Bikin Mal Pelayanan Publik

BOGOR (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong semua pemerintah daerah mendirikan mal pelayanan publik (MPP).

Dia mengatakan mal pelayanan publik penting untuk mempermudah warga mendapat layanan secara terintegrasi.

"Kita memang sedang dorong seluruh kabupaten/kota di Indonesia kita harapkan memiliki MPP dan ini menjadi bagian dari target prioritas. Ini adalah etalase supaya ada pengintegrasian rakyat agar mendapat layanan. Jadi MPP menjadi salah satu concern KemenPAN-RB mendorong pelayanan yang terintegrasi," kata Azwar Anas setelah meninjau Mal Pelayanan Publik Kota Bogor di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (16/9).

Azwar mengatakan ada 67 mal pelayanan publik yang telah berdiri. Jumlah ini, katanya, akan terus bertambah hingga terdapat di semua kabupaten/kota.

"Sekarang 67 yang sudah ada. Sebentar lagi ada beberapa kabupaten/kota yang akan memiliki MPP. Karena MPP ini bisa menjadi legacy bagi kepala daerah," kata Azwar.

"Kita dorong pemda, ini kan sebagian tergantung inovasi dan kreativitas pemerintah daerah. Nah nanti ini akan kita jadikan target indikator untuk memberikan insentif kepada daerah, salah satunya mal pelayanan publik ini," tambahnya.

Azwar menyebut lokasi dan anggaran menjadi salah satu kendala mendirikan mal pelayanan publik. Namun, dia meminta kepala daerah berinovasi agar mal pelayanan publik terbangun sehingga masyarakat lebih cepat terlayani.

Azwar tampak didampingi Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah saat meninjau Mal Pelayanan Publik Kota Bogor yang berada di lantai dasar Mal Lippo Kebon Raya itu.

Dia berharap mal pelayanan publik tersebut bisa mempermudah warga. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANT



Mendagri Izinkan Pejabat Kepala Daerah Jatuhkan Sanksi dan Lakukan Mutasi Pegawai

Sebanyak 271 provinsi dan kabupaten/kota akan dipimpin kepala daerah berstatus pejabat sejak 2022. Hal ini dilakukan akan dilaksanakan Pilkada serentak pada 2024.

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan pejabat (pj) kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota/bupati un-

tuk menjatuhkan sanksi dan memutasi pegawai. Hal itu disampaikan Tito melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ kepada gubernur

maupun wali kota/bupati bertanggal 14 September 2022.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa surat edaran itu juga dialamatkan kepada para pejabat kepala daerah.

"Itu maksudnya ke semua, jadi, gubernur dan bupati, termasuk di dalamnya para pj. Kan mereka sebenarnya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi mereka pejabat,"

kata Benni kepada wartawan, Jumat (16/9).

Dalam surat edaran itu, Tito memberikan persetujuan tertulis kepada pelaksana tugas (Plt), pejabat (Pj), dan pejabat sementara (Pjs) gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan beberapa hal yang sebelumnya harus atas izin Mendagri.

Pertama, memberhentikan, baik permanen maupun sementara, juga termasuk menjatuhkan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintahannya (provinsi/kabupaten/kota) yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum, sesuai ketentuan.

Kedua, menyetujui mutasi antardaerah dan/atau antarinstitusi pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis," tulis Tito.

Tito meminta agar para pelaksana tugas (Plt), Pejabat (Pj) dan Pejabat Sementara (Pjs), Kepala Daerah untuk melapor kepada dirinya maksi-

PIDATO KEBANGSAAN AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kiri) bersama istri Annisa Pohan (kedua kiri) disaksikan Presiden keenam yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) dan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Mallarangeng (kanan) menyapa kader Partai Demokrat usai menyampaikan pidato kebangsaan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (16/9). Pidato kebangsaan itu membahas isu-isu nasional dan strategi Partai Demokrat dalam kemenangan Pemilu 2024.

Sulitnya Ungkap Otak Pembunuhan Munir dan "Tembok Raksasa" Bernama BIN

JAKARTA (IM) - Istri Almarhum aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati menceritakan kesulitan pengungkapan kasus kematian suaminya ketika Tim Pencari Fakta (TPF) bergerak meminta keterangan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN).

TPF yang resmi dibentuk 23 Desember 2004 itu hampir mengalami titik buntu. "Aku ingat bagaimana serentay TPF Munir ketika sudah memasuki wilayah pemeriksaan BIN," kata Suciwati dalam buku yang dia tulis berjudul "Mencintai Munir".

Dia memberikan contoh saat TPF memanggil Mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli untuk diminta keterangan. Nurhadi menolak, bahkan sampai tiga kali. Padahal, dia diduga yang mengangkat Polycarpus sebagai agen utama BIN.

Saat dipanggil, Nurhadi sedang menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria dan masih mengaku sebagai anggota BIN. Penolakan Nurhadi bukan hanya ditujukan pada permintaan TPF, tetapi juga saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta langsung untuk memenuhi panggilan TPF.

"Awalnya tidak dia gubris, setelah sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri meminta Nurhadi untuk kooperatif, bahkan mengancam akan meninjau ulang posisinya sebagai Duta Besar, baru lah Nurhadi mau bertemu TPF Munir selama dua jam,"

kata Suciwati.

Kesulitan tidak hanya terjadi saat memanggil Nurhadi, hal yang sama terjadi saat TPF memanggil mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.

"Tiga kali menolak diperiksa TPF," ucap Suciwati. Begitu juga mantan Deputi V BIN bidang Penggalangan dan Propaganda Muchdi Purwoprandjono, juga menolak dipanggil TPF Munir. Belakangan nama-nama yang disebut oleh Suciwati kembali dimunculkan ke publik oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM).

Sekjen KASUM Bivitri Susanti mengatakan, lima nama yang diduga aktor pembunuhan Munir terdiri dari pejabat BIN hingga jajaran direksi Garuda Indonesia.

"TPF juga pernah merekomendasikan kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri saat itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah nama, antara lain AM Hendropriyono, Muchdi PR, Bambang Irawan, Indra Setyawan, dan Ramelga Anwar, karena diduga merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam permufakatan jahat pembunuhan Munir," kata Bivitri dalam konferensi pers di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).

Sikap ogah-ogahan mantan pejabat BIN ini dinilai menjadi salah satu tembok raksasa yang sulit ditembus dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir.

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura. Pemberitaan Harian Kompas 8 September 2004 menyebutkan, Munir meninggal sekitar dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda, pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil autopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu. Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir telah dilakukan.

Pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polycarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot Garuda Indonesia. Pengadilan juga memvonis 1 tahun penjara kepada Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan. Dia dianggap menempatkan Polycarpus di jadwal penerbangan Munir.

Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembunuhan ini. Akan tetapi, tidak ada petinggi BIN yang dinilai bersalah oleh pengadilan. Pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN, Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, divonis bebas dari segala dakwaan. ● han

Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Kembali Ditetapkan Tersangka KPK

JAKARTA (IM) - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin kembali ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

"Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (16/9).

"Pasal yang diterapkan adalah Pasal 12B dan Pasal 12i UU Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya.

Penyidik KPK menjerat Terbit Rencana Perangin-angin dengan dua pasal sekaligus setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Penyidik bakal kembali mengumpulkan bukti tambahan untuk menguatkan pasal yang disangkakan terhadap Terbit Rencana Perangin-angin.

Penyidik KPK akan mengumpulkan bukti tambahan lewat proses penyelidikan, salah satunya, dengan memeriksa para saksi. KPK sudah mengagendakan pemanggilan terhadap para saksi terkait kasus baru yang kembali menjerat Terbit Rencana Perangin-angin.

"KPK juga mengharapkan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik," imbau Ali.

KPK berjanji bakal transparan dalam mengungkap kasus baru ini. Tak hanya itu, pengembangan perkara yang kembali menjerat Terbit Rencana Perangin-angin ini, kata Ali, merupakan komitmen KPK dalam menuntaskan

berbagai kasus yang ditangani. "Sehingga pada proses penyelidikan dan penuntutan sepanjang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK tak segan menetapkan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka," pungkasnya.

Sekadar informasi, Terbit Rencana Perangin Angin dan kakak kandungnya yang merupakan Kepala Desa Balai Kashi, Iskandar PA telah didakwa oleh Jaksa KPK. Keduanya didakwa telah menerima suap sebesar Rp572 juta. Uang sebesar Rp572 juta tersebut berasal dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin.

Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar PA didakwa menerima suap sebesar Rp572 juta bersama tiga pihak swasta. Tiga pihak swasta lainnya itu yakni, Marcos Surya Abdi; Shuhanda Citra; serta Isfi Syahfira. Mereka diduga merupakan pihak perantara suap Muara ke Terbit Rencana Perangin Angin.

Jaksa menduga uang sebesar Rp572 juta tersebut berkaitan dengan jabatan Terbit Rencana Perangin selaku Bupati Langkat periode 2019 sampai 2024. Uang suap itu diterima Terbit Rencana melalui Iskandar PA; Marcos Surya Abdi; Shuhanda Citra; dan Isfi Syahfira. Uang itu diduga pelicin dari Muara agar perusahaannya mendapat proyek Langkat. ● han



FOTO: ANT

PELUNCURAN KAPAL RIB BANTUAN KEMENHAN UNTUK KODAM IM

Prajurit TNI Kodam Iskandar Muda memberikan penghormatan dari kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) saat peluncuran dan pengujian di Sungai Krueang Aceh, Banda Aceh, Jumat (16/9). Kodam Iskandar Muda menerima lima unit kapal Rigid Inflatable Boat (RIB) produksi PT Praba Cipta Mandiri dan PT Samudera Lautan Biru dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mendukung kelancaran tugas operasional TNI di wilayah Aceh.

PENGUMUMAN PERUBAHAN PENGENDALIAN PT GARDIA PANJI MANDALA
PT GARDIA PANJI MANDALA ("Perseroan"), suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana mengalihkan sebagian saham dalam Perseroan kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.
Bagi para pihak yang berkepentingan yang hendak memperoleh rancangan dan Kreditur yang akan mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tertuang sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, agar dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:
Gedung Girandi
Jalan HR Rasuna Said Blok A, Jakarta Selatan
Demikian Pengumuman ini dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 17 September 2022
Direksi
PT Gardia Panji Mandala